



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI

Kebijakan Merdeka Belajar Satuan Pendidikan-SMA



Alur Materi Perencanaan Berbasis Data di Satuan Pendidikan

	Bab 1	Bab 2	Bab 3	Bab 4
Tema	Merdeka Belajar dan Perencanaan Berbasis Data	Profil dan Platform Rapor Pendidikan	Perencanaan Berbasis Data di Satuan Pendidikan	Monitoring dan Evaluasi
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">• Memahami kebijakan Merdeka Belajar• Memahami konsep Perencanaan Berbasis Data sebagai bagian dari Merdeka Belajar	<ul style="list-style-type: none">• Memahami definisi, kerangka dan struktur Profil Pendidikan• Memahami indikator dalam Profil Pendidikan• Mampu mengakses dan menggunakan platform Rapor Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Mengidentifikasi masalah dan akar masalah berdasarkan Profil Pendidikan• Menetapkan solusi penyelesaian akar masalah• Memasukkan solusi dalam dokumen perencanaan dan anggaran	<ul style="list-style-type: none">• Memahami bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Bab 1: Merdeka Belajar dan Perencanaan Berbasis Data

Dalam sesi ini diharapkan peserta dapat:

01

Memahami kebijakan Merdeka Belajar

02

Memahami konsep Perencanaan Berbasis Data sebagai bagian dari Merdeka Belajar

Kemdikbudristek telah menetapkan **Visi Pendidikan Indonesia** sebagai panduan dalam merumuskan kerja pendidikan

“

Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.



Untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia, dikeluarkan kebijakan Merdeka Belajar bagi tercapainya pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia

Pendidikan Berkualitas

Memastikan peserta didik mengalami kemajuan belajar sehingga lebih kompeten dan berkarakter



Fokus pada pengembangan kompetensi dasar dan karakter

Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Memastikan bahwa kelompok-kelompok yang termarginalkan (sulit mendapat akses pendidikan) dibantu untuk mendapatkan akses pendidikan yg berkualitas.



Intervensi asimetris berfokus pada penguatan kelompok termarginalkan



Berbagai kebijakan Merdeka Belajar untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia sudah diluncurkan

MB 1

Penggantian UN

MB 7

Program Sekolah Penggerak

MB 15

Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Belajar

MB 3

Penyesuaian Kebijakan Dana BOS

MB 8

SMK Pusat Keunggulan

MB 16

Akselerasi dan Pendanaan Satuan Pendidikan Tahun 2022

MB 4

Program Organisasi Penggerak

MB 10

Perluasan Program Beasiswa Lembaga Pengelola Pendidikan

MB 19

Rapor Pendidikan Indonesia

MB 5

Guru Penggerak

MB 12

Sekolah Aman Berbelanja dengan SIPLah



Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data adalah bagian dari Merdeka Belajar untuk memastikan pendidikan berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia

MERDEKA BELAJAR



Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data memperbaiki permasalahan peningkatan mutu pendidikan dengan lebih sederhana dan bermakna

Dahulu

Berbagai sumber dan melakukan pengisian borang berkali-kali

Hasilnya evaluasi yang beragam

Mengukur beragam hal

Perencanaan hanya sebatas pemenuhan dokumen administrasi

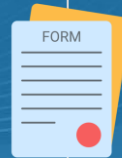
Sekarang

Hanya AN dan Dapodik serta tidak ada pengisian borang-borang tambahan lagi

Evaluasi hanya satu

Mengukur hal yang kunci:
Mutu hasil belajar
dan layanan pendidikan

Proses perencanaan sebagai kegiatan bermakna yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan



Perencanaan berbasis data adalah sebuah perubahan kebiasaan untuk mendorong satuan pendidikan dan dinas pendidikan menyusun kegiatan peningkatan capaian pembelajaran berdasarkan fakta



1. Mengidentifikasi masalah berdasarkan indikator yang ditampilkan di dalam Rapor Pendidikan

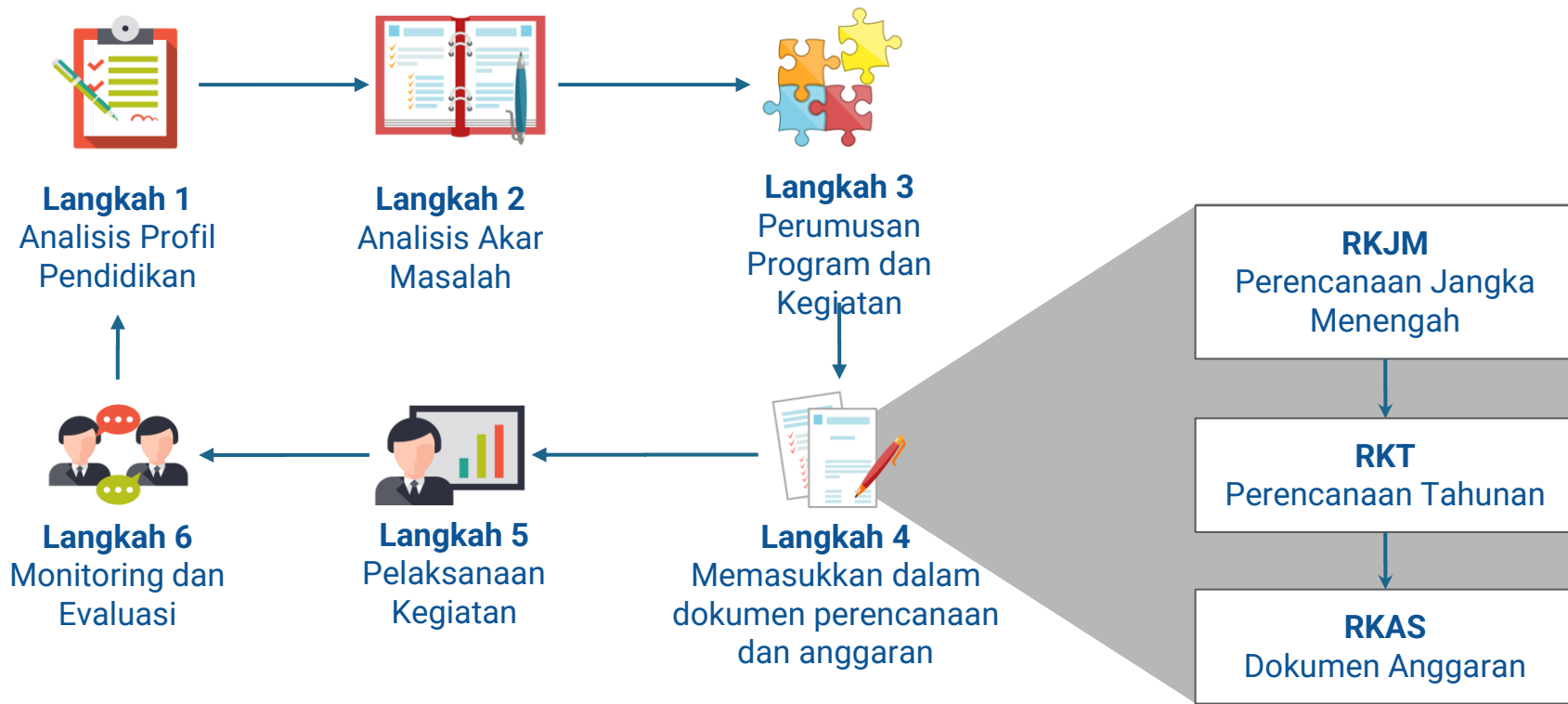


2. Melakukan refleksi capaian, pemerataan, dan proses pembelajaran di satuan pendidikan dan daerah masing-masing



3. Melakukan pembenahan melalui perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (BOS dan BOP) dan daerah (APBD)

Perencanaan berbasis data adalah proses yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam siklus perencanaan satuan pendidikan



Perencanaan berbasis data dilakukan di tingkat pemerintah daerah dan satuan pendidikan



Perencanaan Satuan Pendidikan

- Pendidikan Usia Dini
- Pendidikan Dasar Menengah

Kemendikbudristek akan memfasilitasi satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan berbasis data



1. Bimbingan teknis dan pendampingan perencanaan berbasis data

akan dilakukan mulai bulan Mei hingga sepanjang tahun 2022 bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan



2. Dukungan materi untuk belajar mandiri

disiapkan sehingga pemerintah daerah dan satuan pendidikan dapat mendalami materi perencanaan berbasis data



3. Pusat Bantuan disiapkan untuk menjawab semua pertanyaan terkait rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data, serta menerima masukan untuk perbaikan

Bab 2: Profil Pendidikan dan Platform Rapor Pendidikan

Dalam sesi ini diharapkan peserta dapat:

- 01 Memahami definisi, kerangka, dan struktur Profil Pendidikan
- 02 Memahami indikator dalam Profil Pendidikan
- 03 Mampu mengakses dan menggunakan platform Rapor Pendidikan

Definisi Profil Pendidikan, Rapor Pendidikan, dan Platform Rapor Pendidikan

Profil Pendidikan



laporan komprehensif mengenai layanan pendidikan sebagai hasil dari Evaluasi Sistem Pendidikan yang digunakan sebagai landasan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dan penetapan Rapor Pendidikan

Rapor Pendidikan



indikator terpilih dari Profil Pendidikan yang merefleksikan prioritas Kemendikbudristek yang digunakan untuk menilai kinerja daerah dan satuan pendidikan. Rapor Pendidikan diperoleh dari perbandingan nilai indikator antar tahun (akan ditampilkan mulai tahun 2023).




Platform Rapor Pendidikan







aplikasi berbasis web yang menampilkan informasi Profil Pendidikan dan Rapor Pendidikan. Platform Rapor Pendidikan dapat diakses oleh pengguna yang memiliki akun belajar sesuai dengan kewenangannya.

Rapor Pendidikan dan perencanaan berbasis data adalah alat bantu bagi satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk terus bersama memperbaiki kualitas layanan pendidikan

Rapor Pendidikan dan perencanaan berbasis data adalah perangkat dan cara untuk

-  **Mengidentifikasi akar permasalahan**
-  **Refleksi capaian pendidikan sejauh ini**
-  **Didiskusikan secara konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan untuk membenahi mutu pendidikan**

Rapor Pendidikan dan perencanaan berbasis data bukanlah perangkat dan cara untuk

-  **Menghukum dan mencari siapa yang salah**
-  **Memeringkatkan satuan dan daerah**
-  **Membanding-bandingkan pencapaian**
-  **Menjadi tambahan beban dokumen administrasi yang tidak bermakna**

Dasar Hukum perencanaan berbasis data diatur dalam PP No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendikbudristek No. 09 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

PP No 57 Tahun 2021

Pasal 28

- Perencanaan kegiatan Pendidikan bertujuan untuk **peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan** berdasarkan evaluasi diri Satuan Pendidikan.
- Perencanaan kegiatan Pendidikan **dituangkan dalam rencana kerja jangka pendek** dan rencana kerja jangka menengah.

Pasal 48

3. Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap: a. pendidikan anak usia dini; dan b. pendidikan dasar dan menengah.
4. Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk **perluasan akses dan peningkatan mutu layanan Pendidikan** daerah sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan dan program Pendidikan.

Permendikbudristek No 09 tahun 2022

Pasal 24

- Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan profil pendidikan daerah.
- Evaluasi sistem pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan terhadap:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - b. Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pasal 26

Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bahan untuk melakukan **penyesuaian kebijakan dan perencanaan program** dalam rangka **peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan** sesuai dengan kewenangannya.

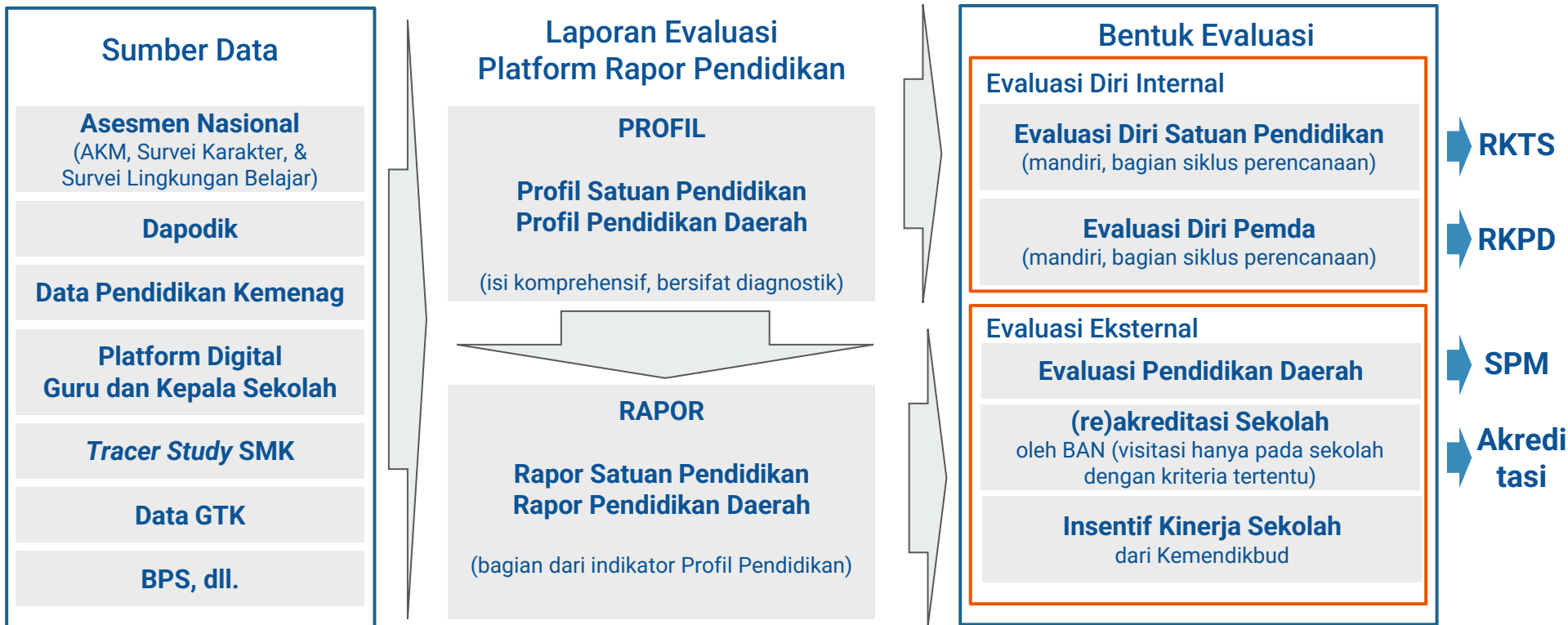
Pasal 28

Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimanfaatkan oleh Satuan Pendidikan untuk:

- **mengidentifikasi masalah pendidikan** yang perlu mendapatkan prioritas berdasarkan indikator dalam profil Satuan Pendidikan atau profil program pendidikan kesetaraan;
- mendalami hasil identifikasi masalah pendidikan untuk **menemukan akar masalah dan merumuskan langkah perbaikan**; dan
- melakukan **perencanaan program** untuk mengatasi akar masalah



Profil Pendidikan merupakan laporan komprehensif tentang layanan pendidikan PAUD Dikdasmen berdasarkan hasil evaluasi sistem pendidikan



Profil Pendidikan merupakan laporan hasil evaluasi layanan pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya



01

Single source of data sebagai dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan.



02

Alat ukur yang berorientasi **pada mutu dan pemerataan hasil belajar (output)**



03

Instrumen pengukuran untuk **evaluasi sistem pendidikan** secara keseluruhan baik untuk evaluasi internal maupun eksternal.



04

Profil pendidikan menjadi **sumber data** untuk perencanaan di tingkat satuan pendidikan dan perencanaan di tingkat pemerintah daerah.



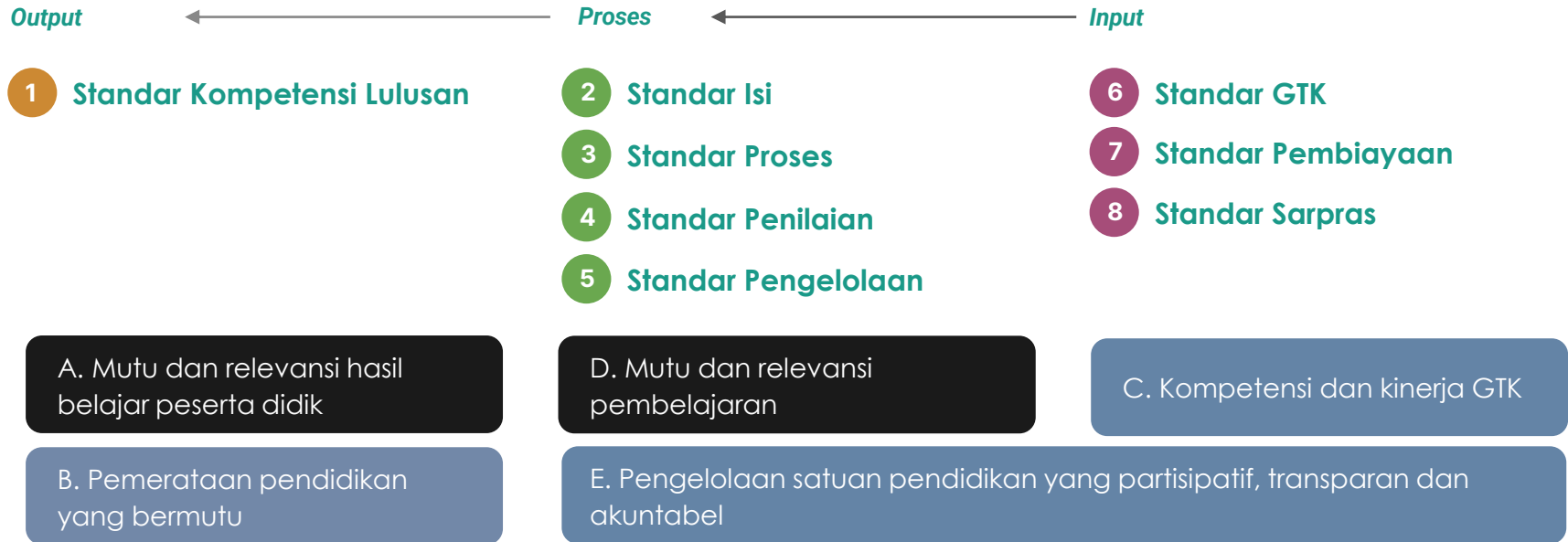
05

Instrumen yang **meringankan beban administrasi** satuan pendidikan dengan mengurangi aplikasi beragam dalam proses evaluasi internal dan eksternal.

Profil Pendidikan merupakan laporan hasil evaluasi layanan pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya

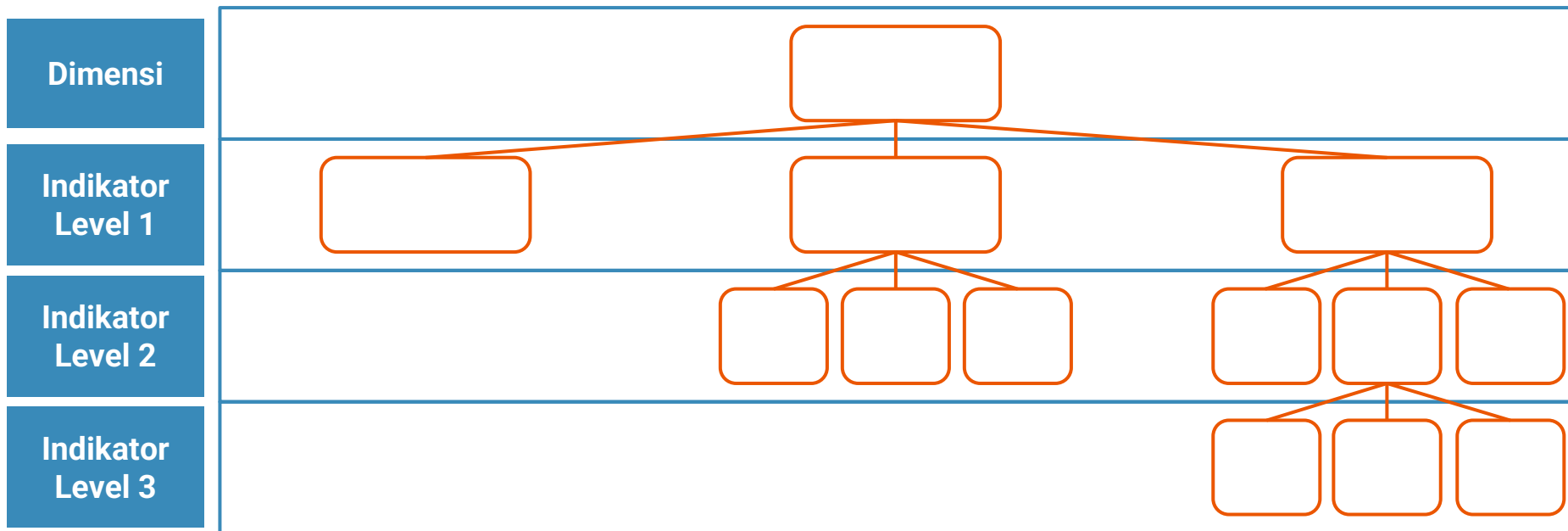
Rapor Pendidikan terdiri dari indikator-indikator yang merefleksikan delapan Standar Nasional Pendidikan dan mencakup area yang berkaitan dengan input, proses, dan output pembelajaran

8 Standar Nasional Pendidikan

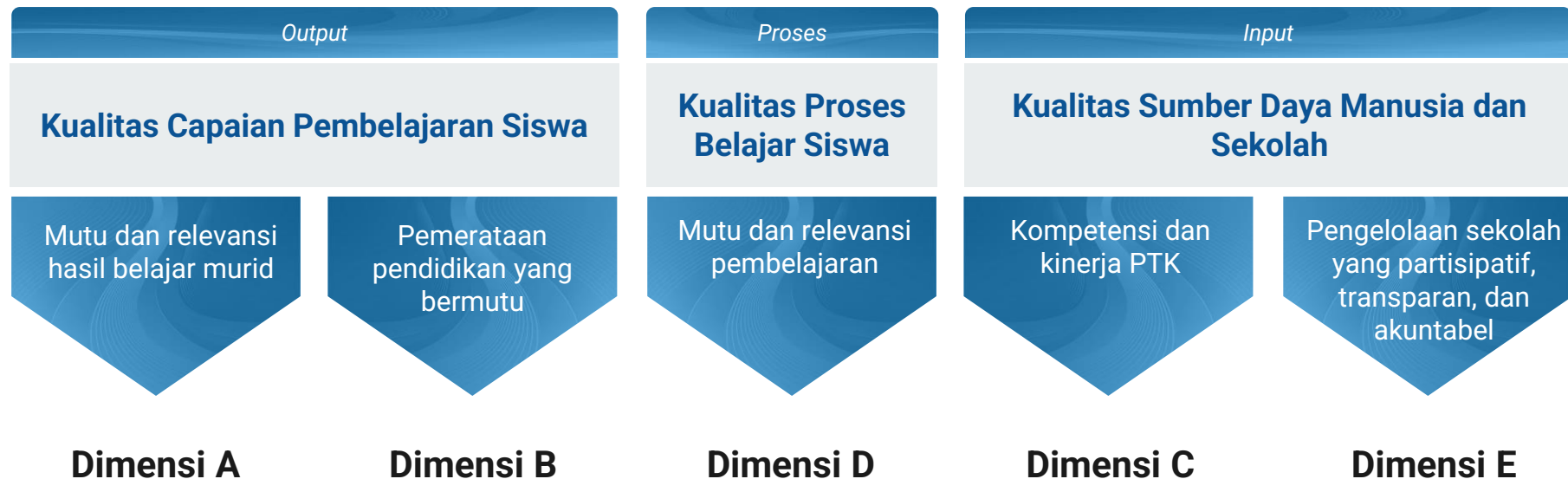


Setiap dimensi terdiri dari indikator yang tersusun dalam beberapa tingkatan

Tiap dimensi terdiri dari beberapa indikator level 1. Indikator level 1 terdiri dari beberapa indikator level 2, dan indikator level 2 terdiri dari beberapa indikator level 3. Beberapa indikator level 2 tidak memiliki indikator level 3, dan beberapa indikator level 1 tidak memiliki indikator level 2.



Struktur Profil Pendidikan Pendidikan Dasar Menengah



Indikator DASMEN

Dimensi

Indikator Level 1

A.

Mutu dan Relevansi Hasil Belajar

Kemampuan literasi

Indeks Karakter

Pendapatan Lulusan SMK

Kemampuan numerasi

Penyerapan Lulusan SMK

Kompetensi Lulusan SMK

B.

Pemerataan Pendidikan Yang Bermutu

Kesenjangan literasi

APS SD/MI/Paket A/SDLB

APS SMA/K/MA/Paket C/SMALB

Kesenjangan numerasi

APK SMP/MTS/Paket B/SMPLB

Kesenjangan karakter

APS SMP/MTS/Paket B/SMPLB

APK SD/MI/Paket A/SDLB

APK SMA/K/MA/Paket C/SMALB

Hanya ada di level daerah

Di level daerah dan satuan pendidikan



Indikator DASMEN

Dimensi

Indikator Level 1

D. Mutu dan Relevansi Pembelajaran

Kualitas pembelajaran	Iklm inklusivitas
Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru	Kesenjangan Iklm inklusivitas
Kepemimpinan instruksional	Kesenjangan fasilitas sekolah antar wilayah
Iklm keamanan sekolah	Kesenjangan kebersihan sekolah (termasuk sanitasi) antar wilayah
Kesenjangan iklim keamanan sekolah	Kesenjangan bahan dan fasilitas belajar literasi
Iklm kesetaraan gender	Kesenjangan akses dan fasilitas belajar daring
Kesenjangan Iklm kesetaraan gender	Pemanfaatan TIK untuk pembelajaran
Iklm kebinekaan	Link and match dengan Dunia Kerja
Kesenjangan Iklm kebinekaan	

Hanya ada di level daerah

Di level daerah dan satuan pendidikan


Proses

Indikator DASMEN

Dimensi

Indikator Level 1

C. Kompetensi dan Kinerja GTK	Proporsi GTK bersertifikat	Kehadiran guru di kelas
	Proporsi GTK penggerak	Indeks distribusi guru
	Pengalaman pelatihan guru	Pemenuhan Kebutuhan Guru
	Kualitas GTK penggerak	Proporsi GTK di SMK yang bersertifikat kompetensi
	Nilai UKG	
Belum tersedia		
E. Pengelolaan sekolah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel	Partisipasi warga sekolah	Pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran
	Proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu	Proporsi pemanfaatan APBD untuk pendidikan
	Hanya ada di level daerah	Di level daerah dan satuan pendidikan

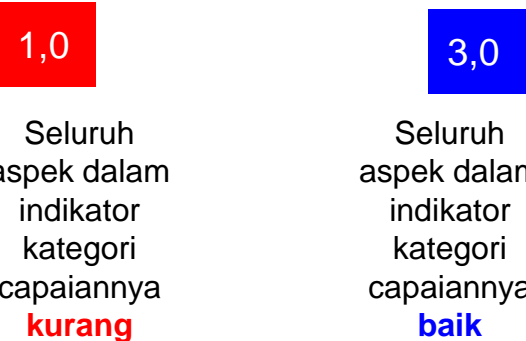
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

2

A.1. Kemampuan Literasi

Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat.

Rentang Nilai Kemampuan Literasi



Atribut/Label di tingkat Satuan Pendidikan

Di atas Kompetensi Minimum	Mencapai Kompetensi Minimum	Di bawah Kompetensi Minimum	Di bawah Kompetensi Minimum
Murid di sekolah menunjukkan tingkat literasi membaca yang cakap dan cukup banyak murid berada pada level mahir.	Sebagian besar murid telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca namun perlu upaya mendorong lebih banyak murid menjadi mahir.	Kurang dari 50% murid telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca.	Sebagian besar murid belum mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca
(2,10-3,0)	(1,80-2,09)	(1,40-1,79)	(1,00-1,39)

Atribut/Label Peserta Didik

Mahir	Peserta didik mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks; mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks.
Cakap	Peserta didik mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks; mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks.
Dasar	Peserta didik mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana.
Perlu Intervensi Khusus	Peserta didik belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana.

A.1. Kemampuan Literasi

Indikator Level 2

A.1.1. Kompetensi membaca teks informasi	Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi teks informasional (non-fiksi).
A.1.2. Kompetensi Membaca Teks Sastra	Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi teks fiksi.
A.1.3. Kompetensi mengakses dan menemukan isi teks (L1)	Kemampuan peserta didik menemukan, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan suatu ide atau informasi eksplisit dalam teks informasional (non-fiksi) dan sastra
A.1.4. Kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks (L2)	Kemampuan peserta didik dalam membandingkan dan mengontraskan ide atau informasi dalam atau antar-teks, membuat kesimpulan, mengelompokkan, mengombinasikan ide dan informasi dalam teks atau antar-teks informasional (non-fiksi) dan sastra.
A.1.5. Kompetensi mengevaluasi dan merefleksi isi teks (L3)	Kemampuan peserta didik dalam menganalisis, memprediksi, dan menilai konten, bahasa, dan unsur-unsur dalam teks informasional (non-fiksi) dan sastra.

A.2. Kemampuan Numerasi

Kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.

Rentang Nilai Kemampuan Numerasi



Atribut/Label di tingkat Satuan Pendidikan

Di atas Kompetensi Minimum	Mencapai Kompetensi Minimum	Di bawah Kompetensi Minimum	Di bawah Kompetensi Minimum
Murid di sekolah menunjukkan tingkat numerasi yang cakap dan cukup banyak murid berada pada level mahir.	Sebagian besar murid telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi namun perlu upaya mendorong lebih banyak murid menjadi mahir.	Kurang dari 50% murid telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi.	Sebagian besar murid belum mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi.
(2,10-3,0)	(1,80-2,09)	(1,40-1,79)	(1,00-1,39)

Atribut/Label Peserta Didik

Mahir	Peserta didik mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya.
Cakap	Peserta didik mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam..
Dasar	Peserta didik memiliki keterampilan dasar matematika: komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin.
Perlu Intervensi Khusus	Peserta didik hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas (penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas).

A.2. Kemampuan Numerasi

Indikator Level 2

A.2.1. Kompetensi pada domain bilangan	Kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika pada konten bilangan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari.
A.2.2. Kompetensi pada domain aljabar	Kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika pada konten aljabar untuk menyelesaikan masalah sehari-hari.
A.2.3. Kompetensi pada domain geometri	Kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika pada konten geometri untuk menyelesaikan masalah sehari-hari.
A.2.4. Kompetensi pada domain data dan ketidakpastian	Kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika pada konten data dan ketidakpastian untuk menyelesaikan masalah sehari-hari.
A.2.5. Kompetensi mengetahui (L1)	Kemampuan peserta didik memahami fakta, proses, konsep, dan prosedur.
A.2.6. Kompetensi menerapkan (L2)	Kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dan pemahaman tentang fakta-fakta, relasi, proses, konsep, prosedur, dan metode dengan konteks situasi nyata untuk menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan.
A.2.7. Kompetensi menalar (L3)	Kemampuan peserta didik menganalisis data dan informasi, membuat kesimpulan, dan memperluas pemahaman dalam situasi baru, meliputi situasi yang tidak diketahui sebelumnya atau konteks yang lebih kompleks.

A.3. Karakter

Tingkat karakter pelajar pancasila yang bersifat holistik mencakup komponen pengetahuan, afektif, keterampilan, dan perwujudan dalam perilaku.

Rentang Nilai Karakter

1,0

3,0

Nilai-nilai karakter
belum terinternalisasi

Nilai-nilai karakter
sudah membudaya

Atribut/Label di tingkat Satuan Pendidikan

Membudaya	Berkembang	Perlu dikembangkan	Belum Terinternalisasi
Murid secara proaktif dan konsisten menerapkan nilai-nilai karakter pelajar pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari hari.	Murid terbiasa menerapkan nilai nilai karakter pelajar pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari hari.	Murid telah menyadari pentingnya nilai nilai karakter pelajar pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global, namun masih perlu dukungan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.	Murid belum memiliki kesadaran akan pentingnya nilai nilai karakter pelajar pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global.
(2,26-3,00)	(2,01-2,25)	(1,85-2,00)	(1,00-1,84)

A.3. Karakter

Indikator Level 2

A.3.1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia	Karakter murid yang berkaitan dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
A.3.2. Gotong royong	Kesediaan dan pengalaman berkontribusi dalam kegiatan yang bertujuan memperbaiki kondisi lingkungan fisik dan lingkungan sosial.
A.3.3. Kreativitas	Kesenangan dan pengalaman untuk menghasilkan pemikiran, gagasan, serta karya yang baru dan berbeda.
A.3.4. Nalar Kritis	Kemauan dan kebiasaan membuat keputusan yang etis berdasarkan analisis logis dan pertimbangan yang objektif atas beragam bukti dan perspektif.
A.3.5. Kebinekaan global	Ketertarikan terhadap keragaman di berbagai negara serta memiliki kepedulian terhadap isu-isu global.
A.3.6. Kemandirian	Kemauan dan kebiasaan mengelola pikiran, perasaan, dan tindakan untuk mencapai tujuan belajar dalam berbagai konteks.

C.1. Persentase GTK Bersertifikat

Persentase guru dan tenaga kependidikan di sekolah yang memiliki sertifikat pendidik

Rentang Nilai % GTK Bersertifikat

0%

100%

Tingkat
sertifikasi
pendidik
rendah

Tingkat
sertifikasi
pendidik
Tinggi

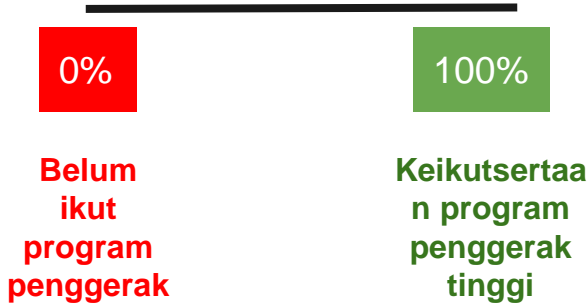
Atribut/Label di tingkat Pemerintah Daerah/Satuan Pendidikan

Baik	Cukup	Kurang
Propinsi/Kabupaten/ Kota/Satuan Pendidikan dengan proporsi GTK bersertifikat pendidik tinggi (68-100%)	Propinsi/Kabupaten/ Kota/Satuan Pendidikan dengan proporsi GTK bersertifikat pendidik cukup (34-67%)	Propinsi/Kabupaten/ Kota/Satuan Pendidikan dengan proporsi GTK bersertifikat pendidik kurang (1,00-1,84)

C.2. Persentase GTK Penggerak

Persentase guru dan tenaga kependidikan di sekolah yang lulus program guru penggerak

Rentang Nilai GTK Penggerak



Atribut/Label di tingkat Pemerintah Daerah/Satuan

Maju	Berkembang	Merintis	Belum relevan
Propinsi/ Kabupaten/Kota/ Satuan Pendidikan sudah maju dalam keikutsertaan guru penggerak	Propinsi/ Kabupaten/Kota/ Satuan Pendidikan berkembang dalam keikutsertaan guru penggerak	Propinsi/Kabupaten/Kota/Satuan Pendidikan sedang merintis dalam keikutsertaan guru penggerak	Propinsi/ Kabupaten/Kota/ Satuan Pendidikan belum menjadi sasaran program guru penggerak
(10-100%)	(5-10%)	(<5%)	

Indikator Level 2

C.2.1. Persentase Guru Penggerak	persentase guru yang lulus program guru penggerak
C.2.2. Persentase KS/Wakil KS Penggerak	persentase KS/ wakil KS yang berasal dari guru penggerak
C.2.3. Persentase Pengawas Penggerak	persentase pengawas yang berasal dari guru penggerak

C.3. Pengalaman Pelatihan Guru

pengalaman guru dalam mendapatkan pelatihan berdasarkan jenis pelatihan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan guru

Rentang Nilai Pengalaman Pelatihan Guru



Atribut/Label di tingkat Pemerintah Daerah/Satuan

Maju	Berkembang	Merintis
Propinsi/ Kabupaten/Kota/ Satuan Pendidikan sudah maju dalam keikutsertaan guru dalam pelatihan (62,6-100%)	Propinsi/ Kabupaten/Kota/ Satuan Pendidikan berkembang dalam keikutsertaan guru dalam pelatihan (25-62,5%)	Propinsi/ Kabupaten/Kota/ Satuan Pendidikan masih merintis dalam keikutsertaan guru dalam pelatihan (<25%)

Indikator Level 2

C.3.1. Pengetahuan bidang studi	persentase guru yang mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan pengetahuan bidang studi
C.3.2. Pedagogi	persentase guru yang mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan pedagogi
C.3.3. Manajerial	persentase guru yang mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan manajerial
C.3.4. Pelatihan lain	persentase guru yang mengikut pelatihan yang berkaitan dengan topik selain pengetahuan bidang studi, pedagogi, dan manajerial

C.4. Kualitas GTK Penggerak (Data belum tersedia)

Pengalaman guru, dan kepala sekolah (KS) penggerak dalam menjadi fasilitator pelatihan

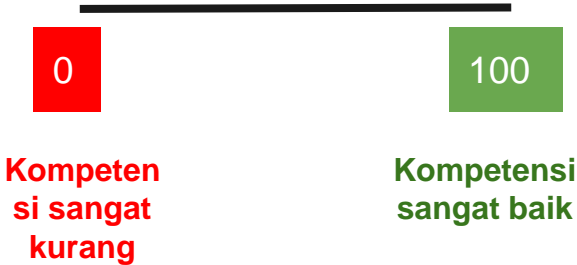
Indikator Level 2

Nama indikator	Definisi
C.4.1. Jumlah guru penggerak yang menjadi pelatih	Persentase guru yang berpartisipasi dalam program guru penggerak dan menjadi pelatih dalam program tersebut
C.4.2. Jumlah pelatihan yang difasilitasi guru penggerak	Rata-rata jumlah pelatihan yang difasilitasi oleh guru penggerak
C.4.3. Jumlah pelatihan yang difasilitasi per KS penggerak	Rata-rata jumlah pelatihan yang difasilitasi oleh KS penggerak
C.4.4. Rerata jumlah guru yang dilatih per guru dan KS penggerak	Rata-rata jumlah guru yang dilatih oleh setiap guru penggerak dan KS penggerak

C.5. Nilai Uji Kompetensi Guru

Nilai uji kompetensi guru berkaitan dengan kompetensi pedagogik dan profesional

Rentang Nilai Uji Kompetensi Guru



Atribut/Label di tingkat Pemerintah Daerah/Satuan

Baik	Cukup	Merintis
Propinsi/ Kabupaten/Kota/ Satuan Pendidikan dengan rata-rata nilai UKG sudah baik (53,9-100%)	Propinsi/ Kabupaten/Kota/ Satuan Pendidikan dengan rata-rata nilai UKG cukup (43,8-53,8%)	Propinsi/ Kabupaten/Kota/ Satuan Pendidikan dengan rata-rata nilai UKG kurang (<43,8%)

Indikator Level 2

Nama Indikator	Definisi
C.5.1. Kompetensi Pedagogik	rata-rata nilai uji kompetensi guru dalam hal kompetensi pedagogik
C.5.2. Kompetensi Profesional	rata-rata nilai uji kompetensi guru dalam hal kompetensi profesional

C.6. Kehadiran Guru di kelas (Data belum tersedia)

Tingkat kehadiran guru di kelas berdasarkan laporan KS dan murid

Indikator Level 2

Nama indikator	Definisi
C.6.1. Kehadiran guru menurut laporan murid	Nilai kehadiran guru berdasarkan laporan murid
C.6.2. Kehadiran guru menurut laporan KS	Nilai kehadiran guru berdasarkan laporan KS

D.1. Kualitas Pembelajaran

Tingkat kualitas interaksi antara guru, murid, dan materi pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Rentang Nilai Kualitas Pembelajaran

A horizontal line with a red square at the left end and a green square at the right end. Below the red square is the text 'Pembelajaran tidak optimal' in red. Below the green square is the text 'Pembelajaran optimal' in green.

Nilai Kualitas Pembelajaran	Kategori
1,0	Pembelajaran tidak optimal
3,0	Pembelajaran optimal

1,0

3,0

Pembelajaran tidak optimal

Pembelajaran optimal

Atribut/Label di tingkat Satuan Pendidikan

Optimal	Terarah	Disorientasi
<p>Pembelajaran menunjukkan kualitas yang optimal ditunjukkan dengan suasana kelas yang kondusif, dukungan afektif dan aktivasi kognitif dari guru yang konstruktif.</p> <p>(2,26-3,00)</p>	<p>Pembelajaran mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif dan adanya dukungan afektif serta aktivasi kognitif dari guru</p> <p>(1,85-2,25)</p>	<p>Suasana pembelajaran yang kondusif, dukungan afektif dan aktivasi kognitif belum diberikan oleh guru.</p> <p>(1,00-1,84)</p>

D.1. Kualitas Pembelajaran

Indikator Level 2

D.1.1 Manajemen kelas	Praktik pembelajaran melihat proses perilaku murid dan pemusatan perhatian terhadap aktivitas tugas yang relevan.
D.1.2 Dukungan afektif	Praktik pembelajaran dengan melihat pemenuhan kebutuhan murid guna merasa kompeten dan dihargai sebagai bagian dari kelas.
D.1.3 Aktivasi kognitif	Praktik pengajaran yang bertujuan untuk membimbing dan mendukung murid dalam membangun pemahaman atau pengetahuan baru.
D.1.4 Pembelajaran praktik vs teori	Kualitas pelaksanaan praktik dan teori di satuan Pendidikan di SMK.

D.2. Refleksi Dan Perbaikan Pembelajaran Oleh Guru

Tingkat aktivitas refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru.

Rentang Nilai Refleksi Dan Perbaikan Pembelajaran Oleh Guru



Atribut/Label di tingkat Satuan Pendidikan

Membudaya	Aktif	Pasif
Guru aktif meningkatkan kualitas pembelajaran setelah melakukan refleksi pembelajaran yang telah lalu, mengeksplorasi referensi pengajaran baru, dan berinovasi menghadirkan pembelajaran yang memantik keterlibatan peserta didik.	Kegiatan pengembangan kualitas pembelajaran yang dilakukan belum terstruktur. Guru belum konsisten melakukan refleksi pembelajaran, mengeksplorasi referensi pengajaran baru, dan mencetuskan inovasi baru.	Upaya peningkatan kualitas pembelajarannya sporadis hanya untuk sekedar menyelesaikan tugas. Guru menggunakan cara berulang untuk melakukan pembelajaran dan tidak nampak adanya proses reflektif.
(2,26-3,00)	(1,85-2,25)	(1,00-1,84)

D.2. Refleksi Dan Perbaikan Pembelajaran Oleh Guru

Indikator Level 2

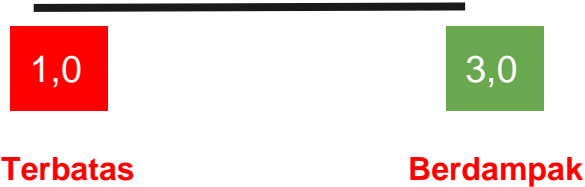
D.2.1 Belajar tentang pembelajaran	Aktivitas belajar yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengajar.
D.2.1 Belajar tentang pembelajaran	Tingkat refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru khusus penilaian refleksi atas praktik mengajar.
D.2.3 Penerapan praktik inovatif	Tingkat refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru khusus penilaian penerapan praktik inovatif

D.3. Kepemimpinan Instruksional

Atribut/Label di tingkat Satuan Pendidikan

Tingkat kepemimpinan instruksional sekolah yang mendukung perbaikan kualitas pembelajaran.

Rentang Nilai Kepemimpinan Instruksional



Berdampak	Terarah	Terbatas
Kepemimpinan instruksional yang visioner dengan mengacu pada visi-misi sekolah secara konsisten. Termasuk mengkomunikasikan visi-misi kepada warga sekolah sehingga perencanaan, praktik dan asesmen pembelajaran berorientasi peningkatan hasil belajar murid melalui dukungan program, sistem insentif atau sumber daya yang memadai yang berdampak pada membudayanya guru melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran.	Kepemimpinan instruksional mengarah pada visi-misi sekolah sehingga mendorong sebagian perencanaan, praktik dan asesmen pembelajaran mulai mengarah pada orientasi peningkatan hasil belajar murid dengan adanya program, sistem insentif atau sumber daya yang mulai mendukung guru melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran.	Kepemimpinan instruksional belum mengacu pada visi misi sekolah, belum mendorong perencanaan, praktik dan asesmen pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan hasil belajar murid dan belum mengembangkan program, sistem insentif dan sumber daya yang mendukung guru melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran.
(2,26-3,00)	(1,85-2,25)	(1,00-1,84)

D.3. Kepemimpinan Instruksional

Indikator Level 2

D.3.1 Visi-misi sekolah	Penyampaian dan penerapan visi-misi sekolah yang berpusat pada perbaikan pembelajaran.
D.3.2 Pengelolaan kurikulum sekolah	Mengelola pengembangan kurikulum sekolah dengan berorientasi pada peningkatan hasil belajar murid.
D.3.3 Dukungan untuk refleksi guru	Program, sistem insentif, dan sumberdaya yang mendukung refleksi guru dan perbaikan pembelajaran

D.4. Iklim Keamanan Sekolah

Atribut/Label di tingkat Satuan Pendidikan

Tingkat rasa aman dan kenyamanan murid dari hal rasa aman di sekolah, perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan sekolah.

Rentang Nilai Iklim Keamanan Sekolah

1,0

3,0

Rawan

Aman

Aman

Satuan pendidikan memiliki lingkungan sekolah yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga sekolah dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan sekolah.

(2,26-3,00)

Waspada

Satuan pendidikan mulai mengembangkan iklim keamanan dalam aspek kesejahteraan psikologis, perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, satuan pendidikan dapat melanjutkan intervensi dengan meningkatkan kemampuan mencegah dan menangani kasus di lingkungan sekolah.

(1,85-2,25)

Rawan

Satuan pendidikan belum mendukung terciptanya iklim keamanan dalam aspek kesejahteraan psikologis, perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, satuan pendidikan harus melakukan intervensi dengan memberikan pengetahuan dan kapasitas kepala sekolah dan guru untuk mendukung terciptanya iklim keamanan di lingkungan sekolah.

(1,00-1,84)

D.4. Iklim Keamanan Sekolah

Indikator Level 2

D.4.1 Kesejahteraan psikologis murid	Tingkat kesejahteraan murid di sekolah terhadap perasaan aman dan berkehidupan.
D.4.2 Kesejahteraan psikologis guru	Tingkat kesejahteraan guru ketika berada di lingkungan sekolah dan saat mengajar.
D.4.3 Perundungan	Perilaku menyakiti orang lain (secara fisik dan psikis) yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang.
D.4.4 Hukuman fisik	Tingkat aktivitas yang berkaitan dengan pemberian hukuman fisik untuk meningkatkan disiplin murid.
D.4.5 Kekerasan seksual	Tingkat aktivitas yang berkaitan dengan kekerasan seksual di satuan pendidikan dan murid yang berada pada sekolah tersebut.
D.4.6 Narkoba	Tingkat aktivitas yang berkaitan dengan narkoba di satuan pendidikan dan murid yang berada pada sekolah tersebut.

D.5. Kesenjangan Iklim Keamanan

Kesenjangan iklim yang aman secara fisik dan psikologis berdasarkan kelompok sosial ekonomi status dan kelompok wilayah.

Rentang Nilai Kesenjangan Iklim Keamanan



Kesenjangan Sangat Tinggi

Tidak Ada Kesenjangan

Atribut/Label di tingkat Satuan Pendidikan

Tidak Ada Kesenjangan	Ada Kesenjangan	Kesenjangan Sangat Tinggi
Satuan Pendidikan secara aktif mensosialisasikan dan menyuarakan dukungan akan pentingnya mewujudkan kesetaraan hak-hak sipil antar kelompok gender dengan dasar prinsip keadilan.	Satuan Pendidikan mendukung kesetaraan hak-hak sipil antar kelompok gender. Dukungan tersebut seringkali didasari oleh alasan pragmatis dan cenderung bersifat pasif.	Satuan Pendidikan belum mendukung kesetaraan hak-hak sipil antar kelompok gender, dimana keduanya cenderung melihat posisi suatu kelompok gender lebih tinggi dari kelompok gender lainnya.
(2,26-3,00)	(1,85-2,25)	(1,00-1,84)

Indikator Level 2

D.5.1 Kesenjangan Iklim Keamanan antar status sosial ekonomi	Kesenjangan iklim keamanan antar kelompok sosial ekonomi.
D.5.2 Kesenjangan Iklim Keamanan antar Wilayah	Kesenjangan iklim keamanan antar kelompok wilayah.

D.6. Iklim Kesetaraan Gender

Dukungan atas kesetaraan hak dan kemampuan laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran publik

Rentang Nilai Iklim Kesetaraan Gender



Atribut/Label di tingkat Satuan Pendidikan

Membudaya	Merintis	Perlu Peningkatan
Satuan Pendidikan secara aktif mensosialisasikan dan menyuarakan dukungan akan pentingnya mewujudkan kesetaraan hak-hak sipil antar kelompok gender dengan dasar prinsip keadilan	Satuan Pendidikan mendukung kesetaraan hak-hak sipil antar kelompok gender. Dukungan tersebut seringkali didasari oleh alasan pragmatis dan cenderung bersifat pasif.	Satuan Pendidikan belum mendukung kesetaraan hak-hak sipil antar kelompok gender, dimana keduanya cenderung melihat posisi suatu kelompok gender lebih tinggi dari kelompok gender lainnya.
(2,26-3,00)	(1,85-2,25)	(1,00-1,84)

Indikator Level 2

D.6.1 Dukungan atas kesetaraan gender	Kesenjangan iklim keamanan antar kelompok gender.
---------------------------------------	---

D.7 Kesenjangan Iklim Kesetaraan Gender

Kesenjangan kesetaraan hak dan kemampuan laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran publik berdasarkan kelompok sosial ekonomi status dan kelompok wilayah.

Rentang Nilai Kesenjangan Iklim Kesetaraan Gender



Atribut/Label di tingkat Satuan Pendidikan

Tidak Ada Kesenjangan	Ada Kesenjangan	Kesenjangan Sangat Tinggi
Tidak ada perbedaan indeks iklim kesetaraan gender baik berdasar kelompok sosial ekonomi maupun antar wilayah urban dan rural.	Ada kesenjangan indeks iklim kesetaraan gender baik berdasar kelompok sosial ekonomi maupun antar wilayah urban dan rural.	Kesenjangan sangat tinggi indeks iklim kesetaraan gender baik berdasar kelompok sosial ekonomi maupun antar wilayah urban dan rural.
(2,26-3,00)	(1,85-2,25)	(1,00-1,84)

Indikator Level 2

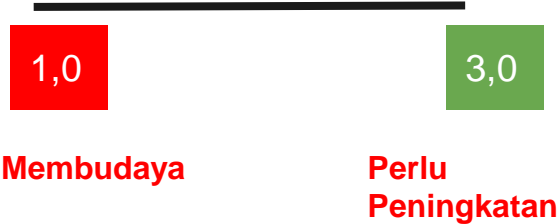
D.7.1 Kesenjangan Iklim Kesetaraan gender antar status sosial ekonomi	Kesenjangan iklim kesetaraan gender antar kelompok sosial ekonomi
D.7.2 Kesenjangan iklim kesetaraan gender berdasarkan wilayah	Kesenjangan iklim kesetaraan gender antar kelompok wilayah.

D.8 Iklim Kebinekaan

Atribut/Label di tingkat Satuan Pendidikan

Iklim kebinekaan menyangkut bagaimana lingkungan sekolah menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya dan mengenai komitmen kebangsaan.

Rentang Nilai Iklim Kebinekaan



Membudaya	Merintis	Perlu Peningkatan
Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, budaya dan gender, serta memperkuat nasionalisme	Satuan pendidikan mulai mengembangkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama /kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, budaya, dan gender; memperkuat nasionalisme.	Satuan pendidikan belum mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, budaya, dan gender; memperkuat nasionalisme.
(2,26-3,00)	(1,85-2,25)	(1,00-1,84)

D.8 Iklim Kebinekaan

Indikator Level 2

D.8.1 Toleransi agama dan budaya	Sikap menerima dan menghargai keragaman agama dan budaya di sekolah.
D.8.2 Sikap Inklusif	Sikap inklusif murid dan guru di sekolah.
D.8.3 Dukungan atas kesetaraan agama dan	Dukungan dalam kesetaraan hak - hak sipil antara kelompok mayoritas dan minoritas agama dan budaya dari guru dan pimpinan sekolah.
D.8.4 Komitmen kebangsaan	Tingkat komitmen kebangsaan pimpinan sekolah.

D.9 Kesenjangan Iklim Kebinekaan

Kesenjangan indeks kebinekaan sekolah berdasarkan kelompok sosial ekonomi status dan kelompok wilayah.

Rentang Nilai Kesenjangan Iklim Kebinekaan



Tidak Ada Kesenjangan

Kesenjangan Sangat Tinggi

Atribut/Label di tingkat Satuan Pendidikan

Tidak Ada Kesenjangan	Ada Kesenjangan	Kesenjangan Sangat Tinggi
Tidak ada perbedaan indeks iklim kebinekaan baik berdasar kelompok sosial ekonomi maupun antar wilayah urban dan rural. (2,26-3,00)	Ada kesenjangan indeks iklim kebinekaan baik berdasar kelompok sosial ekonomi maupun antar wilayah urban dan rural. (1,85-2,25)	Kesenjangan sangat tinggi indeks iklim kebinekaan baik berdasar kelompok sosial ekonomi maupun antar wilayah urban dan rural. (1,00-1,84)

Indikator Level 2

D.9.1 Kesenjangan Iklim Kebinekaan antar status sosial ekonomi	Tingkat komitmen kebangsaan pimpinan sekolah.
D.9.2 Kesenjangan iklim kebinekaan berdasarkan wilayah	Kesenjangan kebinekaan antar kelompok wilayah.

D.10 Iklim Inklusivitas

Iklim inklusivitas menyangkut bagaimana lingkungan sekolah menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya.

Rentang Nilai Iklim Inklusivitas



Membudaya

Perlu Peningkatan

Atribut/Label di tingkat Satuan Pendidikan

Membudaya	Merintis	Perlu Peningkatan
Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa.	Satuan pendidikan mulai mengembangkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa.	Satuan pendidikan belum mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa.
(2,26-3,00)	(1,85-2,25)	(1,00-1,84)

Indikator Level 2

D.10.1 Layanan disabilitas	Layanan sekolah yang melingkupi pengetahuan dan sikap tentang murid dengan disabilitas.
D.10.2 Layanan sekolah untuk murid cerdas dan bakat istimewa	Layanan sekolah yang melingkupi pengetahuan dan sikap tentang murid cerdas dan berbakat istimewa
D.10.3 Sikap Terhadap Disabilitas	Sikap guru terhadap disabilitas tentang aspek afektif, kognitif, dan perilaku.

D.11 Kesenjangan Iklim Inklusivitas

Kesenjangan indeks kebinekaan sekolah berdasarkan kelompok sosial ekonomi status dan kelompok wilayah.

Rentang Nilai Kesenjangan Iklim Inklusivitas



Tidak Ada Kesenjangan

Kesenjangan Sangat Tinggi

Atribut/Label di tingkat Satuan Pendidikan

Tidak Ada Kesenjangan	Ada Kesenjangan	Kesenjangan Sangat Tinggi
Tidak ada perbedaan indeks iklim inklusivitas baik berdasar kelompok sosial ekonomi maupun antar wilayah urban dan rural. (2,26-3,00)	Ada kesenjangan indeks iklim inklusivitas baik berdasar kelompok sosial ekonomi maupun antar wilayah urban dan rural. (1,85-2,25)	Ada kesenjangan indeks iklim inklusivitas baik berdasar kelompok sosial ekonomi maupun antar wilayah urban dan rural. (1,00-1,84)

Indikator Level 2

D .11.1 Kesenjangan Iklim Inklusivitas antar status sosial ekonomi	Kesenjangan inklusivitas antar kelompok sosial.
D.11.2 Kesenjangan iklim Inklusivitas berdasarkan wilayah	Kesenjangan inklusivitas antar kelompok wilayah.

D.14 Kesenjangan Fasilitas Literasi Satuan Pendidikan

Nilai kesenjangan fasilitas satuan pendidikan berdasarkan kelompok sosial ekonomi status dan kelompok wilayah.

Rentang Nilai Kesenjangan Iklim Inklusivitas



Atribut/Label di tingkat Satuan Pendidikan

Tidak Ada Kesenjangan	Ada Kesenjangan	Kesenjangan Sangat Tinggi
Tidak ada perbedaan fasilitas literasi satuan pendidikan baik berdasar kelompok sosial ekonomi maupun antar wilayah urban dan rural.	Ada kesenjangan fasilitas literasi satuan pendidikan baik berdasar kelompok sosial ekonomi maupun antar wilayah urban dan rural.	Kesenjangan sangat tinggi fasilitas literasi satuan pendidikan baik berdasar kelompok sosial ekonomi maupun antar wilayah urban dan rural.
(2,26-3,00)	(1,85-2,25)	(1,00-1,84)

Indikator Level 2

D.14.1 Kesenjangan fasilitas literasi antar status sosial ekonomi	Kesenjangan kepemilikan buku dan akses lain yang berkaitan dengan literasi murid (baca, hitung, dll) berdasarkan kelompok ekonomi.
D.14.2 Kesenjangan fasilitas literasi satuan pendidikan berdasarkan	Tingkat kesenjangan kepemilikan buku dan akses lain yang berkaitan dengan literasi murid (baca, hitung, dll) berdasarkan kelompok wilayah.

E.1 Partisipasi warga sekolah

Atribut/Label di tingkat Satuan Pendidikan

Inklusif	Selektif	Restriktif
Satuan pendidikan telah melibatkan orang tua dan murid baik dalam kegiatan akademik maupun nonakademik secara keseluruhan di satuan pendidikan.	Satuan pendidikan melibatkan orang tua dan murid dalam beberapa kegiatan di satuan pendidikan khususnya berupa kegiatan akademik dan atau non-akademik.	Satuan pendidikan sangat terbatas melibatkan orang tua dan murid dalam berbagai kegiatan di satuan pendidikan.
(2,26-3,00)	(1,85-2,25)	(1,00-1,84)

Indikator Level 2

E.1.1 Partisipasi orang tua	Tingkat keterlibatan orang tua dalam proses perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan aktivitas di sekolah.
E.1.2 Partisipasi murid	Tingkat keterlibatan murid dalam proses perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan aktivitas di sekolah.

Tingkat partisipasi orang tua dan peserta didik dalam pengelolaan sekolah.

Rentang Nilai Partisipasi Warga Sekolah



Inklusif

Restriktif

E.2 Pemanfaatan sumber daya sekolah

Proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu

Rentang Nilai Pemanfaatan SDS



Atribut/Label di tingkat Daerah

Tinggi	Cukup	Rendah
Satuan pendidikan memiliki proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu yang tinggi	Satuan pendidikan memiliki proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu yang cukup	Satuan pendidikan sangat terbatas melibatkan orang tua dan murid dalam berbagai kegiatan di satuan pendidikan.
Nilai ambang (>59,4%)	Nilai ambang (29,7-59,4%)	(<29.7%)

Indikator Level 2

- E.2.1 Proporsi pembelanjaan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan
- E.2.2 Proporsi pembelanjaan non personil mutu pembelajaran

E.3. Pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran

tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendanaan sekolah

Rentang Nilai Pemanfaatan TIK



Atribut/Label di tingkat Satuan Pendidikan

Tinggi	Cukup	Rendah
Satuan pendidikan memiliki proporsi pembelanjaan dana BOS secara daring yang tinggi	Satuan pendidikan memiliki proporsi pembelanjaan dana BOS secara daring yang cukup	Satuan pendidikan memiliki proporsi pembelanjaan dana BOS secara daring yang rendah
$\geq 16,8\%$	$(8,4-16,8\%)$	$(<8,4\%)$

Indikator Level 2

E.3.1. Proporsi pembelanjaan dana BOS secara daring

E.3.3. Indeks penggunaan platform SDS sumberdaya sekolah (ketepatan waktu dan kelengkapan pelaporan)

Permasalahan yang terjadi di suatu indikator dapat dicari akar masalahnya dari indikator yang lain



TERIMA KASIH



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi